

2023



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LKjIP)



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2023 dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan dapat disusun atas dasar Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Pemerintah, Keputusan Kepala LAN RI Nomor 589/IX.6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, SE Menpan Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja dan Peraturan Menpan No.29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan Tugas dan Fungsi, kewenangan pengelolaan sumber daya manusia serta evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengembangkan Visi, Misi dan Tujuan organisasi. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKjIP ini masih kurang sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan dimasa yang akan datang.

Akhirnya dari penyusunan LKjIP Tahun 2023 ini dengan memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah SWT semoga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan mampu melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya dan dapat meningkatkan prestasi kerja yang baik.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN**

Drs. DIANTO HARI WIBOWO, M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19760410 199412 1 002

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
C. Data Umum Organisasi.....	6
1. Personil.....	6
2. Sarana dan Prasarana	9
3. Pembiayaan.....	12
D. Sistematika Penyajian LKjIP	13
BAB II	14
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	14
A. Rencana Strategis	14
1. Tujuan.....	15
2. Sasaran dan Indikator Kinerja	16
B. Rencana Kinerja Tahun 2023.....	17
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	19
BAB III	25
AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	25
A.1 Pencapaian Kinerja.....	26
A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja RPJM Tahun 2021-2023	27
A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan RPJMD/RENSTRA	29
A.4 Analisis Penyebab Keberhasilan Yang Telah Dilakukan.....	33
A.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	35
A.6 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Pencapaian Kinerja.....	37
B. Realisasi Anggaran.....	38
BAB IV.....	44
PENUTUP	44
A. KESIMPULAN.....	44
B. SARAN	44

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dengan telah berlakunya Instruksi Presiden 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Keputusan Kepala LAN RI Nomor 589/IX.6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistematisasi LKjIP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan Tahun 2023 menjelaskan capaian kinerja selama tahun 2023 yang mengacu rencana strategis Kabupaten Lamongan 2021-2026, yang telah dijabarkan dalam Rencana Kinerja sebagian komitmen pertanggung jawaban pelaksanaan kinerja tahun 2023. Sesuai dengan rencana kinerja tahun 2023. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan melaksanakan 6 (Enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 34 (Tiga puluh empat) sub kegiatan. Dari sasaran, tujuan, program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari situasi dan kondisi masyarakat yang tetap kondusif walaupun di dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala namun dapat dilaksanakan sesuai harapan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan perlu dinilai secara terukur tingkat keberhasilannya. Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang didalamnya antara lain mewajibkan kepada pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Kinerjanya selama kurun waktu satu tahun dalam bentuk LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sebuah wujud kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Berangkat dari pemikiran diatas, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dimana setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, kewenangan organisasi dan pengelolaan sumberdaya yang didasarkan kepada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disampaikan kepada atasan masing-masing instansi. Sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang telah dirancang dan disusun dalam format Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian didefinitifkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memuat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan organisasi yang diimplementasikan dalam program dan kegiatan-kegiatan sesuai perencanaan

strategis. Selain pertanggungjawaban Kinerja, dalam laporan ini juga berisi pertanggungjawaban keuangan atas anggaran yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan Tahun 2023 merupakan laporan kedua dari 6 (enam) tahun perencanaan strategis, dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Bakesbangpol Kabupaten Lamongan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya peningkatan dalam melaksanakan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2023 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Bakesbangpol Kabupaten Lamongan di tahun yang akan datang.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, perlu menetapkan Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lamongan.

1. Tugas

Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan adalah merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintah dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

2. Fungsi

Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

- a. Pengoordinasian perumusan dan penetapan Rencana Strategis, program Kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Badan Daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan

kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Penyelenggaraan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan fasilitasi Forum koordinasi Pimpinan Daerah;
- g. Pembinaan administrasi kesekretariatan Badan; dan
- h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

- a. **Kepala Badan;**
- b. **Sekretaris**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan Badan, yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. **Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional, koordinasi,

pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, yang membawahi:

- 1) Sub Bidang Politik Dalam Negeri
- 2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

d. Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, yang membawahi:

- 1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
- 2) Sub Bidang Penanganan Konflik

e. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama, yang membawahi:

- 1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
- 2) Sub Bidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan agama

f. Unit Pelaksana Teknis Badan

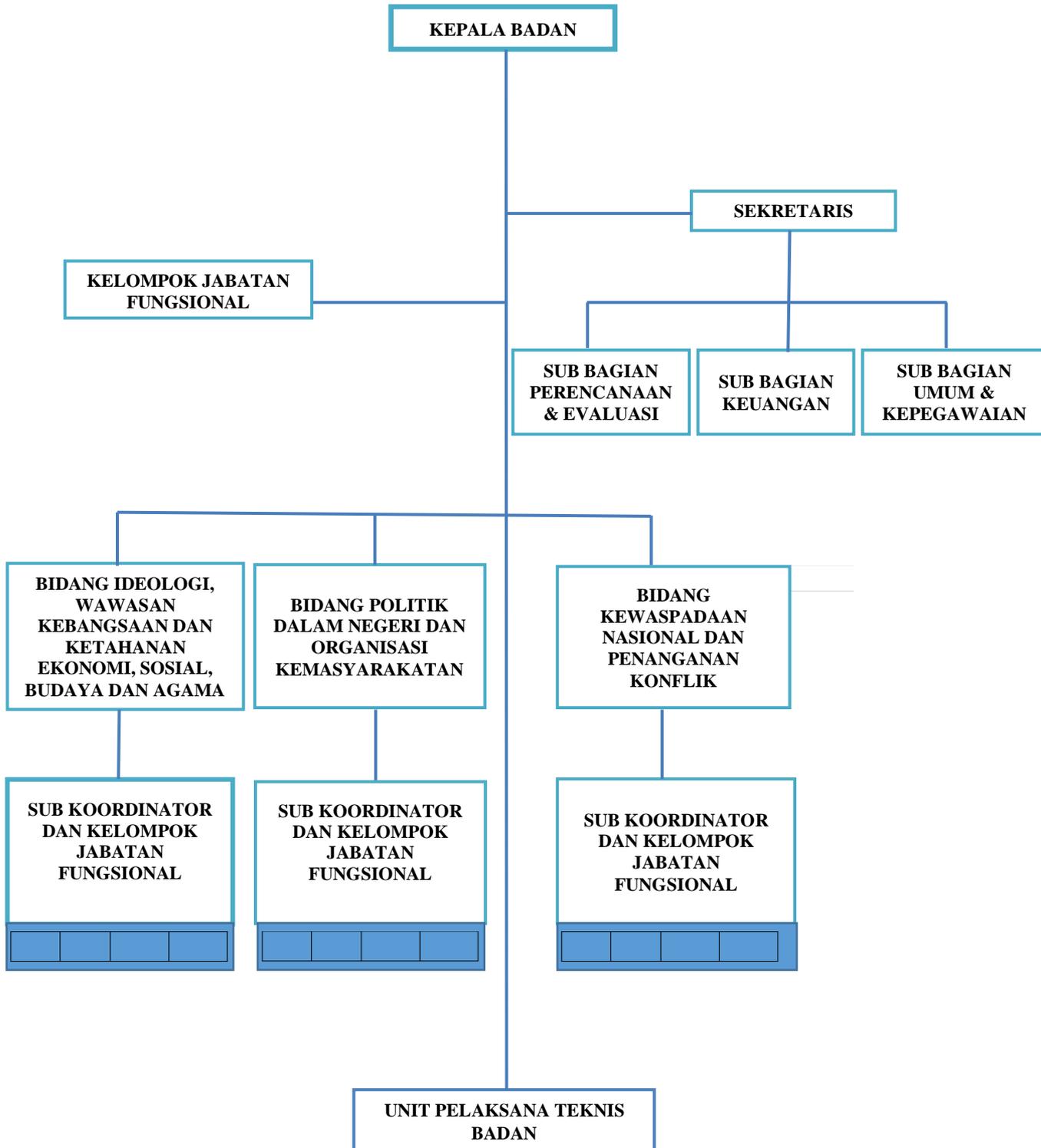
g. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun susunan organisasi Bakesbangpol Kabupaten Lamongan dalam bentuk bagan struktur adalah sebagaimana bagan berikut ini:

Bagan 1.1

Struktur Organisasi Bakesbangpol Kabupaten Lamongan

A. Struktur Organisasi



C. Data Umum Organisasi

1. Personil

Untuk melaksanakan tugas pokok fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan didukung 41 (empat puluh satu) pegawai, yang terinci sebagai berikut :

Tabel 1.1

Klasifikasi ASN Bakesbangpol Kab. Lamongan Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	5
2	III	15
3	II	1
4	I	-
	Total	21

Berdasarkan tabel diatas, ASN bakesbangpol tidak ada yang bergolongan I dan mayoritas bergolongan III dengan jumlah 14 pegawai ASN.

Tabel 1.2

Klasifikasi Pegawai Bakesbangpol Kab. Lamongan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	24 Orang
2.	Perempuan	17 Orang
	JUMLAH	41 Orang

Berdasarkan tabel diatas mayoritas pegawai di Bakesbangpol adalah laki-laki dengan jumlah 24 orang dan perempuan sejumlah 17 orang.

Tabel 1.3

Klasifikasi Pegawai Bakesbangpol Kab. Lamongan Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status kepegawaian	Jumlah
1.	PNS	21 Orang
2.	Tenaga kontrak	20 Orang
	JUMLAH	41 Orang

Berdasarkan tabel diatas mayoritas status kepegawaian di Bakesbangpol adalah PNS dengan selisih satu orang dengan pegawai kontrak. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai berstatus ASN perlu ditambah.

Tabel 2.4

Klasifikasi Pegawai Bakesbangpol Kab. Lamongan Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	PNS	PPPK	TKK	Jumlah
1	S2	6	0	0	6
2	S1/D4	11	0	17	29
3	D3	0	0	0	0
4	SMA/Sederajat	4	0	3	7
5	SMP/Sederajat	0	0	0	0
	Total	21	0	20	41

Berdasarkan tabel 2.4, mayoritas pegawai Bakesbangpol memiliki pendidikan terakhir S1/D4. Sedangkan kualifikasi pendidikan terakhir D3 dan SMP/Sederajat tidak ada. Dapat disimpulkan untuk kualifikasi pendidikan terakhir S2 dirasa masih kurang sehingga kompetensi pegawai masih perlu untuk ditingkatkan.

Tabel 2.5

Klasifikasi Pegawai Bakesbangpol Kab. Lamongan Berdasarkan Jabatan

No	Posisi	Jabatan	Jumlah
1.	Pimpinan	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 orang
2.	Sekretaris	Sekretaris	1 orang
		Kasubbag	3 orang
		Staf	11 orang
3.	Bidang Kewaspadaan Nasional & Penanganan Konflik	Kepala Bidang	1 orang
		Pejabatn Fungsional Sub Koordinator Sub Bidang	2 orang
		Staf	7 orang
4.	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Kepala Bidang	1 orang
		Pejabatn Fungsional Sub Koordinator Sub Bidang	2 orang
		Staf	4 orang
5.	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Kepala Bidang	1 orang
		Pejabatn Fungsional Sub Koordinator Sub Bidang	1 orang
		Staf	4 orang

Berdasarkan tabel diatas, Bakesbangpol terdiri dari tiga bidang dan satu sekretariat serta dipimpin oleh seorang Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dimana setiap bidang terdiri dari satu Kepala Bidang, dua Pejabatan Fungsional Sub Koordinator Sub Bidang dan beberapa staf. Sedangkan untuk sekretariat terdiri dari sekretaris, tiga kasubag dan beberapa staf. Dapat disimpulkan bahwa setiap bidang memiliki dua Kasubid namun jumlah staf yang ada masih dirasa kurang untuk membantu pencapaian kinerja disetiap bidang.

2. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana Penunjang Operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Data Penunjang Sarana dan Prasarana Bakesbangpol Kab. Lamongan

No	Nama Barang	Jumlah
1	Mobil	6
2	Pick Up	1
3	Sepeda Motor	10
4	Speed Boat	1
5	Motor Boad	2
6	Motor Tempel	1
7	Perahu Karet	3
8	Gergaji	2
9	Sepatu Katak	3
10	Mesin Ketik	7
11	Tas Selam	1
12	Sepatu Selam	2
13	Bouyancy Control Devive	4
14	Kompresor	1
15	Kacamata Selam	2
16	Oct topus	3
17	Presure Gauge	3
18	Regulator selam	2
19	Snorkel Selam	2
20	Tabung	2
21	Kostum Renang	2
22	Tas Selam	1
23	Lemari Besi/Kayu	17
24	Band Kas	1
25	Lemari Kaca	5
26	White Board Elektronik	1

27	Bag Scubapro	1
28	Booties Scubapro	1
29	Fin Scubapro	1
30	Mask Scubapro	1
31	Regulator	1
32	Sabuk	1
33	Snorkel	1
34	Tabung Udara	1
35	Timah	1
36	Wetsuit	1
37	Lemari Kayu	7
38	Tempat Tidur Besi	2
39	Meja Rapat	1
40	Meja Tulis	1
41	Kursi Rapat	65
42	Tenda	2
43	Sofa	2
44	Meja Kursi Tamu	1
45	Tampar	3
46	Lampu Hias	6
47	Gorden	1
48	Genset	1
49	Rak Besi	5
50	Lemari es	1
51	AC	13
52	Kipas Angin	6
53	Televisi	3
54	Tip Wireless	1
55	Mega Phone	3
56	Tangga Alumunium	1
57	Tangki Air	1
58	Mainframe	5

59	LCD Proyektor	2
60	PC.Unit	18
61	Laptop	5
62	Note Book	6
63	Tablet	3
64	PC All In One	1
65	Printer	22
66	Meja Kerja	25
67	Kursi Kerja	22
68	Kamera	15
69	Marching Trombone	1
70	Korsik	1
71	Perekam	1
72	Handycame	2
73	Trompet	1
74	Comcoder	1
75	Prosume	1
76	Kamera Drone	1
77	Video Audio Jack Panel	5
78	Telescope	1
79	Kompas	6
80	Amplifier	1
81	Telephone PABX	1
82	Pesawat Telephone	2
83	Han Talky (HT)	2
84	Faximile	1
85	UT SSB Portable	2
86	UT HF Portable	2
87	CCTV	1
88	Senter	3
89	Gas Sylinder	1
90	Teropong	1

91	Kursi Eselon II	2
92	Headphone	4
93	Tripod	2
94	Mixer	1
95	Battery	1
96	Lighting	2
97	Mic	4
98	Orbit	1
99	Stundmic	4
100	Video Swithcer	1

Berdasarkan tabel 1.2 terdapat 100 jenis sarana dan prasarana yang menunjang kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan.

3. Pembiayaan

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Bakesbangpol Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan sasaran indikator dengan didukung 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan dengan jumlah anggaran **Rp. 41.978.296.600,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 13.204.658.447,00** atau **31,46%** dengan rincian sebagaimana tabel tersebut dibawah ini :

Tabel 1.3

Rincian Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lamongan Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pesen (%)
	BELANJA DAERAH	41.978.296.600,00	13.204.658.447,00	31,46
1	BELANJA OPERASI	41.938.709.300,00	13.165.224.447,00	31,39
	Belanja Pegawai	2.730.492.000,00	2.627.792.787,00	96,24
	Belanja Barang dan Jasa	3.131.692.300,00	3.073.981.660,00	98,16
	Belanja Hibah	36.076.525.000,00	7.463.450.000,00	20,69
2	BELANJA MODAL	39.587.300,00	39.434.000,00	99,61
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.587.300,00	39.434.000,00	99,61
	JUMLAH BELANJA DAERAH	41.978.296.600,00	13.204.658.447,00	31,46

D. Sistematika Penyajian LKjIP

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Bakesbangpol Kabupaten Lamongan selama tahun 2023. Capaian kinerja 2023 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang, dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Bakesbangpol Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai latar belakang, tugas pokok, fungsi, dan gambaran umum organisasi yang terdiri dari personil, sarana prasarana serta pembiayaan Perangkat Daerah.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam Bab ini diuraikan Rencana Strategis yang terdiri dari tujuan, sasaran, indikator sasaran, Rencana Kinerja Tahun 2023, program dan kegiatan serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Bab ini diuraikan Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV : PENUTUP

Dalam Bab ini diuraikan kesimpulan atas capaian kinerja Bakesbangpol Kabupaten Lamongan Tahun 2023 dan saran langkah-langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan Bakesbangpol untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Matris Rencana Strategik (RS)
- Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2023
- Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Lampiran lainnya (Penghargaan dsb.)

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang di dalamnya antara lain mewajibkan kepada pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Kinerjanya selama kurun waktu satu tahun dalam bentuk LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Sebagai tolak ukur kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan diambil dari perwujudan visi Kabupaten Lamongan **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”**. Visi merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh institusi pemerintah. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan Kedepan lebih berfokus pada terciptanya stabilitas politik dan keamanan daerah yang mantap dan dinamis dengan menggerakkan seluruh potensi secara tepat, terarah, terencana dan terpadu. Misi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lamongan masuk ke dalam misi ke-4 Kabupaten Lamongan yaitu **“Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, religious, berbudaya, aktif dalam pembangunan serta lingkungan yang aman dan tentram”**. Uraian misi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lamongan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya harus mampu mengkoordinasikan situasi dan kondisi daerah agar tetap kondusif, aman dan tertib menjaga suatu pemerintahan yang demokratis dengan menumbuhkembangkan kehidupan berpolitik sebagai upaya untuk merekatkan kehidupan berbangsa yang transparan serta aktif dan mandiri.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk periode 5 (lima) tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Rencana Kerja Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan.

Dalam merespon perubahan dan penerapan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud, dalam praktek kehidupan berBangsa dan berNegarapun telah mengalami perubahan-perubahan seperti misalnya dalam bidang politik. Berdasarkan pemaparan tersebut diatas jelas bahwa peran pemerintah yang pada masa lalu sangat kuat dan kini

harus dibagi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Pembagian peranan sebagaimana dimaksud dirasakan sangat efektif untuk diterapkan di era otonomi daerah dewasa ini.

Pemikiran tersebut didasarkan pada anggapan bahwa lembaga pemerintah di daerah beserta seluruh warga masyarakatnya adalah pihak yang paling tahu akan kebutuhan dan permasalahan yang ada di daerah masing-masing. Disinilah perlunya diadakan suatu perencanaan pembangunan yang terencana, komprehensif namun tetap memperhatikan eksistensi daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam penyusunan Renstra harus ada keterkaitan antara Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dengan dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan pembangunan dalam periode lima tahun kedepan, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan merupakan instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan dilakukan secara simultan (bersamaan waktunya) dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026. Untuk mendapatkan masukan guna penajaman dan penyempurnaan substansi rancangan Renstra tersebut telah dilaksanakan Forum Perangkat Daerah yang melibatkan para pemangku kepentingan pelayanan Perangkat Daerah dan akan menetapkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan lebih lanjut akan menjadi pedoman dengan dokumen perencanaan lainnya.

1. Tujuan

Tujuan Pembangunan di dalam RPJMD adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat di Kabupaten Lamongan. Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan 2021-2026 merupakan implementasi dari penjabaran misi ke 4 (empat). Adapun tujuannya adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, religious, berbudaya, aktif dalam pembangunan serta lingkungan yang aman dan tentram	Meningkatnya Toleransi	Nilai Toleransi

2. Sasaran dan Indikator Kinerja

a. Sasaran

Dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan 2021-2026 digambarkan rumusan Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai. Dari tujuan tersebut Bakesbangpol mempunyai 3 (tiga) sasaran yang merupakan bagian integral dalam perencanaan strategik. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN
Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Sejahtera, Religius-berbudaya, Aktif Dalam Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan Tentram	Meningkatkan Toleransi	Nilai Toleransi	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Harmonisasi sosial dan Wawasan Kebangsaan Meningkatnya kesadaran politik masyarakat Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah

a. Indikator Kinerja

Indikator kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Adapun Indikator kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongantahun 2016-2021 adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan

No	SASARAN	INDIKATOR	PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya Harmonisasi sosial dan Wawasan Kebangsaan	Persentase konflik ipoleksosbud, hukum dan HAM yang ditangani	Jumlah konflik ipoleksosbud, hukum dan HAM yang ditangani x 100 Jumlah konflik yang ada
	Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase peningkatan pendidikan politik	Akumulasi jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik x 100 Jumlah kelompok masyarakat sasaran pendidikan politik (Jumlah sasaran = 800)
	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai Sakip merupakan akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja. Nilai SAKIP PD dikeluarkan oleh Inspektorat

B. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bakesbangpol Kabupaten Lamongan untuk tahun 2023 diturunkan dari Renstra Bakesbangpol Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026. RKA (Rencana Kerja Anggaran) disusun mengacu kepada klasifikasi anggaran yaitu belanja daerah menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Jadi RKT memuat rencana capaian kinerja dari Renstra yang bersifat tahunan, yaitu target- target kinerja output dari setiap kegiatan, target outcome dari setiap sasaran dalam mendukung tujuan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bakesbangpol untuk tahun 2023, disajikan di dalam Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Terkait dengan rencana kinerja tahunan, supaya rencana/target capaian kinerja yang tercantum di dalam Rencana Kinerja Tahunan dapat terukur, maka disusun indikator kinerja yaitu indikator *output* dan *outcome* yang disusun sesuai dengan alokasi anggaran kegiatan berdasarkan DPA Awal tahun 2023. Komponen rencana kinerja tahunan tahun 2023 yang disusun berdasarkan Renstra secara rinci memuat tentang tujuan, program, sasaran/kegiatan, *output* dan indikator *output*, serta *outcome* dan indikator *outcome*.

Penetapan indikator kinerja kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus dikelola. Penetapan indikator kinerja dimaksudkan untuk dapat menggambarkan

kinerja sasaran dan kegiatan yang hendak dicapai sebagai target capaian kinerja. Dengan demikian, indikator kinerja tersebut diupayakan memiliki kriteria spesifik dan jelas, dapat diukur secara obyektif, layak dicapai, serta relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Bakesbangpol Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu tertentu. Di dalam rencana kinerja tahunan tahun 2023, indikator kinerja yang dikembangkan dan disepakati untuk pengukuran capaian kinerja adalah indikator output dan outcome dan diuraikan berdasarkan kegiatan dan sasaran serta target kuantitatif atau kualitatifnya.

Indikator outcome yang ditetapkan lebih merupakan indikator yang bersifat *immediate outcome* yang akan dicapai dan dapat diukur pada akhir tahun anggaran berjalan. Indikator output ditetapkan pertahun berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari masing-masing kegiatan. Berikut akan disampaikan mengenai rencana kinerja tahun 2023 baik berupa sasaran berserta indikator kinerja serta program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2023 yang tertuang dalam rencana kinerja tahun 2023.

Tabel 2.4
Rencana Kinerja 2023
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lamongan

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM
1.	Meningkatnya Toleransi	Nilai Toleransi	Meningkatnya Harmonisasi sosial dan Wawasan Kebangsaan Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase konflik ipoleksosbud, hukum dan HAM yang ditangani Persentase peningkatan pendidikan politik	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan

			Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial 6. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
--	--	--	---	---	---

Tabel 2.5
Program Tahun Anggaran 2023
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lamongan

No	Program	Indikator
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai IKM Internal Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan dan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan bagi Pemuda
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta	Persentase cakupan pendidikan politik masyarakat
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas, Orpem dan LSM yang bertentangan dengan asas pancasila
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah; untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Bakesbangpol Kabupaten Lamongan telah membuat perjanjian kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023 dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan. Penyusunan Perjanjian Kinerja Bakesbangpol Kabupaten Lamongan Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Bakesbangpol Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Penetapan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja. Adapun perjanjian kinerja Bakesbangpol tahun 2023 adalah sebagaimana pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Bakesbangpol Tahun 2023

Eselon II

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya Harmoni Sosial dan Wawasan Kebangsaan	Prosentase Konflik Ipoleksosbud, Hukum dan HAM yang ditangani	100%
Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase Peningkatan Pendidikan Politik	55%
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	89,10

Eselon III

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Nilai IKM Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	84
Meningkatnya Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat	55%
Meningkatnya Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas, Orpem Dan LSM Yang bertentangan dengan asas pancasila	0%

Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan dan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Bagi Masyarakat	65%
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	45%
Meningkatnya Kewaspadaan Daerah dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%

Eselon IV

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/Bulan
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 laporan
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	44 Stel
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9 Dokumen
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	730 peserta
Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1 Dokumen
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	400 orang
	Jumlah Parpol yang menerima bantuan	10 Parpol

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	149 Laporan
Tersusunnya Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	3 Dokumen
Tersusunnya Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen
Terlaksananya Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah lembaga Ormas, Orpem dan LSM yang menerima bantuan	20 Orang 25 Ormas/ LSM
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	3 Dokumen
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3790 Peserta

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	654 Laporan
Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	12 Dokumen

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *Actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya.

Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan piranti perencanaan yang telah dibuat. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

A. Capaian Kinerja Organisasi

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan didasarkan pada target dan Realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana yang semakin baik. Penghitungan

prosentase pencapaian rencana (Formulir Pengukuran Kinerja) perlu memerhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja.

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Visi Kabupaten Lamongan. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator diberlakukan skala pengukuran dan predikat kinerja yaitu :

Tabel 3
Skala Pengukuran Keberhasilan

Skala Pengukuran	Penilaian
85 – 100	Sangat baik/sangat berhasil
70 < 85	Baik sekali
55 < 70	Kurang baik/kurang berhasil
< 55	Sangat kurang baik/tidak berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

A.1 Pencapaian Kinerja

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Indikator keberhasilan pembangunan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat dari keberhasilan Kabupaten Lamongan dalam menjaga tetap terjaminnya kondisi sosial politik di daerah cukup mantap, aman, tertib dan terkendali. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan
Tahun 2023

No	SARASAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN 2023	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Harmoni Sosial dan Wawasan Kebangsaan	Prosentase Konflik Ipoleksosbud, Hukum dan HAM yang ditangani	100%	100% $\frac{12}{12} \times 100$	100%	sangat baik/ sangat berhasil
2	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase Peningkatan Pendidikan Politik	55%	81,25% $\frac{650}{800} \times 100$	147,73%	sangat baik/ sangat berhasil
3	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	89,10			

Pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan mengacu pada indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel di atas secara umum indikator sasaran program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan telah dicapai dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian 100% target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan. Keberhasilan yang telah dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh beberapa program, yaitu Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial, Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada akhir tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja RPJM Tahun 2021-2023

Keberhasilan program atas realisasi dan capaian dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dan capaian tahun 2021-2023. Adapun

perbandingan capaian dan realisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		Peningkatan Capaian dari tahun 2021 ke tahun 2023
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
	Meningkatnya Harmoni Sosial dan Wawasan Kebangsaan	Prosentase Konflik Ipoleksosbud, Hukum dan HAM yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Terpenuhi
	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase Peningkatan Pendidikan Politik	100%	100%	50%	250%	81,25%	147,73%	Terpenuhi
	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	88,97		89,07	102,23%			

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan dari tahun 2022 ke tahun 2023 berdasarkan indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran yang ditetapkan secara umum capaian tiga sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan telah terpenuhi, yaitu:

1. Meningkatnya harmoni sosial dan wawasan kebangsaan, yaitu indikator prosentase konflik sosial yang ditangani dengan target 100% terpenuhi dengan capaian 100% dari 12 konflik yang ada semuanya tertangani dalam kewenangan Bakesbangpol Kabupaten Lamongan. Tercapainya indikator tersebut didukung dari kegiatan dalam Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, dan Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, serta Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

2. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat, yaitu:
 - a. Indikator Persentase Peningkatan Pendidikan Politik pada tahun 2023 direncanakan dengan target 55% terealisasi sebesar 81,25% dengan capaian 147,73%, yaitu dengan target yang telah ditentukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan dalam lima tahun sebanyak 800 peserta, telah terealisasi sebanyak 650 peserta sampai dengan tahun 2023. Tercapainya indikator tersebut di dukung dari Parogram Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dan Juga dari kegiatan Partai Politik yang telah menerima dana Banpol.
3. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah, yaitu Indikator Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan target nilai sebesar 89,07 pada tahun 2023 telah di dapat melalui penilaian dari Inspektorat sebesar

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan RPJMD/RENSTRA

Keberhasilan program atas realisasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2021-2026 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan pada Review Rencana Strategis. Perbandingan realisasi kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Target RPJMD/RENSTRA

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Th ke-					Realisasi Capaian Th ke-				
				2023	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berwawasan kebangsaan serta sadar politik	-	Nilai Toleransi	67,6	70,3	73,12	76,04	79,08	86,77	89,69	-	-	-
		Meningkatnya Harmonisasi sosial dan Wawasan Kebangsaan	Persentase konflik ipoleksosbud, hukum dan HAM yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
		Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase peningkatan pendidikan politik	20%	40%	60%	80%	100%	50%	81,25%	-	-	-
			Persentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan Presiden dan pemilihan DPD/DPR/ DPRD	-	-	78,53%	-	-	-	-	-	-	-
			Persentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Gubernur	-	-	62,00%	-	-	-	-	-	-	-
			Persentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Bupati	-	-	77,24%	-	-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	87,13	87,14	87,15	87,16	87,17	89,07	-	-	-	-

Tabel diatas merupakan perbandingan realisasi indikator kinerja tahun kedua RPJMD yaitu Tahun 2023 dengan target kinerja tahun 2022-2026 (Tahun kedua RPJMD) Terdapat tiga indikator yang tidak dilaksanakan tiap tahun yaitu Persentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan Presiden dan pemilihan DPD/DPR/DPRD, Persentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Gubernur, Persentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Bupati dan baru akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dari semua indikator yang dilaksanakan pada tahun 2023 dapat dilihat bahwa capaian kinerja telah memenuhi target bahkan lebih, sehingga sebisa mungkin di tahun-tahun selanjutnya dapat dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya.

A.4 Analisis Penyebab Keberhasilan Yang Telah Dilakukan

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus menjadi tolak ukur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara umum keberhasilan dari capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan tahun 2023 telah mencapai target dan rencana kerja yang telah ditetapkan. Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan tahun 2023 dalam Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berwawasan kebangsaan serta sadar politik telah mencapai target yang telah di tetapkan tahun 2023. Hal ini didukung dengan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Adapun faktor yang mendukung keberhasilan realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan berdasarkan capaian dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, antara lain:

Sasaran: 1. Meningkatnya harmoni sosial dan wawasan kebangsaan

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, dimana dalam upaya pencapaiannya didukung oleh 4 (empat) Program, 4 (empat) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.4
Indikator Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase konflik ipoleksosbud, hukum dan HAM yang ditangani	100%	100%	100%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Konflik Ipoleksosbud, Hukum dan HAM yang diselesaikan, Indikator ini tercapai dengan katagori **sangat berhasil** yaitu 100% dari target 100% dengan capaian kinerja 100%. Indikator ini didukung oleh 4 (empat) Program, 4 (empat) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan. Keberhasilan indikator ini dikarenakan peran aktif Tim Monitoring, Tim PKS, Tim Kewaspadaan Daerah dan FKUB dalam melakukan kegiatan pencegahan konflik melalui kegiatan di Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama, serta dukungan bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial melalui kegiatan deteksi dini terhadap ATHG oleh Tim Monitoring, pengamanan wilayah oleh Jajaran samping seperti Polres dan Kodim dan Penanganan Konflik sosial yang timbul di masyarakat oleh Bakesbangpol bersama FORKOPIMDA, serta adanya pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Masyarakat agar tidak menyimpang dari asas Pancasila dan dapat mendukung kondusifitas wilayah Kabupaten Lamongan.

Sasaran: 2. Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui program Pendidikan Politik Masyarakat, dimana dalam upaya pencapaiannya didukung oleh satu program, satu kegiatan dan dua sub kegiatan dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.5
Indikator Sasaran 2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Peningkatan Pendidikan Politik	55%	81,25%	147,73%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. **Persentase Peningkatan Pendidikan Politik** Indikator ini tercapai dengan kategori **sangat berhasil** yaitu tercapai 147% dari target 55% terealisasi sebesar 81,25%. Indikator ini didukung oleh 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Keberhasilan indikator ini didukung oleh Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik melalui kegiatan sosialisasi Pendidikan Politik yang dilakukan

Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan dan Kegiatan Partai Politik yang mendapatkan dana Hibah Parpol.

Sasaran: 3. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dimana dalam upaya pencapaiannya didukung oleh satu program, tujuh kegiatan dan dua puluh satu sub kegiatan dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.6
Indikator Sasaran 3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	89,10		

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah **Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** dengan target nilai sebesar 89,10 pada tahun 2023 telah di dapat melalui penilaian dari Inspektorat sebesar . Keberhasilan indikator ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dimana dalam upaya pencapaiannya didukung oleh satu program, tujuh kegiatan dan dua puluh satu sub kegiatan

A.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mewujudkan peningkatan Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berwawasan kebangsaan serta sadar politik dibutuhkan tim monitoring dengan jumlah sebanyak 54 Orang dengan pembagian 2 orang per wilayah kecamatan. Namun saat ini tim monitoring Bakesbangpol sejumlah 11 Orang dimana diperlukan penambahan personil sebanyak 43 Orang untuk monitoring wilayah (petugas lapang).

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra-PD maupun Standart Operasional Prosedur (SOP) guna memberikan kelancaran dalam melayani masyarakat.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar Rp. 41.978.296.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.204.658.447,00 atau 31,46%, adapun

sebagian besar anggaran yang tidak terserap yaitu dana hibah kepada pemerintah pusat (KPU dan Bawaslu) tidak dapat melakukan penyerapan terhadap sebesar Rp. 28.607.982.380,00 dikarenakan adanya kendala sistem pencairan, sehingga rencana dilakukan pembayaran pada tahun 2024. Adapun alokasi per sasaran pembangunan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.7
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya Harmoni Sosial dan Wawasan Kebangsaan	Prosentase konflik Ipoleksosbud, Hukum dan HAM yang diselesaikan	3.853.737.600,00	3.828.162.590,00	99,34%
Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase peningkatan pendidikan politik	34.511.007.000,00	5.902.994.620,00	17,10%
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.613.552.000,00	3.473.501.237,00	96,12%

Tabel 3.8
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sasaran	Indikator	%Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	%Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Harmoni Sosial dan Wawasan Kebangsaan	Prosentase konflik Ipoleksosbud, Hukum dan HAM yang diselesaikan	100%	99,34%	0,66%

Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase peningkatan pendidikan politik	147,73%	17,10%	82,9%
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		96,12%	3,88%

Dari Tabel di atas dapat diketahui anggaran yang direncanakan telah dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi dan tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Bakesbangpol Kabupaten Lamongan pada tahun 2023.

A.6 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Pencapaian Kinerja

Program dan Kegiatan Bakesbangpol Kabupaten Lamongan Tahun 2023 yang di *breakdown* ke dalam 6 (Enam) program, 12 (Dua belas) kegiatan dan 34 (Tiga puluh empat) sub kegiatan. Semuanya merupakan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan serta indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan dengan tiga sasaran dan tiga indikator pada tahun 2023 yaitu; Presentase konflik ipoleksosbud, hukum dan HAM yang ditangani, Persentase Peningkatan Pendidikan Politik, dan Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politilk dimana program dan kegiatan tersebut bersumber dari program Nasional serta mengacu pada kaedah-kaedah perencanaan kegiatan.

Program atau kegiatan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan pada umumnya sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa kendala dan hambatan yang ditemui dalam mencapai keberhasilan tersebut. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan harmoni sosial dan wawasan kebangsaan serta meningkatkan pendidikan politik masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah personil tim monitoring Bakesbangpol masih kurang;
- b. Belum adanya pendidikan wawasan kebangsaan yang berbasis pembelajaran;
- c. Belum optimalnya penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan pengawasan Ormas dan LSM;
- d. Sasaran sosialisasi UU Pemilu yang masih kurang luas;

- e. Belum maksimalnya penegasan dukungan anggaran sukses Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024 yang teruang dalam surat Kemendagri Nomor 900/5451/Polpum.
- f. Adanya kendala sistem pencairan sehingga pagu yang dianggarkan tidak dapat terserap secara maksimal.

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut diatas, maka diperlukan upaya-upaya dalam penanggulangannya. Adapaun upaya-upaya dalam menanggulangi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menambah personil tim monitoring Bakesbangpol;
- b. Mengadakan kegiatan pramuka kebangsaan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan;
- c. Meningkatkan pemahaman terkait Regulasi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas dan LSM dan senantiasa berkoordinasi dengan Bakesbang Provinsi terkait mekanisme penerbitan SKT dan pengawasan Ormas/LSM;
- d. Perlunya kerjas sama dengan instansi lain dalam sosialisasi Pendidikan Politik untuk memperluas sasaran, seperti KPU dan Parpol;
- e. Mengkoordinasikan dengan BPKAD untuk pengajuan anggaran yang belum teralokasikan dan memprioritaskan kegiatan yang teruang dalam surat Kemendagri Nomor 900/5451/Polpum untuk mensukseskan pemilu tahun 2024.

B. Realisasi Anggaran

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Akuntabilitas keuangan merupakan sarana pengukuran dalam alokasi dana yang mendukung pencapaian sasaran dengan indikator sasaran program dan pencapaian kegiatan dengan indikator kinerja, meliputi *output dan outcome*.

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Bakesbangpol Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan sasaran indikator, dengan 6 (Enam) program, 12 (Dua belas) kegiatan dan 34 (Tiga puluh empat) sub kegiatan dengan alokasi anggaran tahun 2023 sebesar sebesar Rp. 41.978.296.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.204.658.447,00 atau 31,46%. Adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut:

Tabel 3.9
Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2023

NO	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.613.552.000,00	3.473.501.237,00	96,12
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000,00	34.845.500,00	99,56
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000,00	14.860.550,00	99,07
2)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00	19.984.950,00	99,92
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.760.492.000,00	2.657.792.387,00	96,28
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.730.492.000,00	2.627.792.787,00	96,24
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000,00	14.999.850,00	100,00
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000,00	14.999.750,00	100,00
c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.030.000,00	18.958.000,00	99,62
1)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	13.650.000,00	13.608.000,00	99,69
2)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.380.000,00	5.350.000,00	99,44
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	101.765.000,00	86.743.213,00	85,24
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4.997.500,00	99,95
2)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	4.999.900,00	100,00
3)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	29.937.500,00	99,79
4)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	14.999.425,00	100,00
5)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.440.000,00	8.970.000,00	58,10
6)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.325.000,00	22.838.888,00	72,91

e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.000.000,00	39.434.000,00	98,59
1)	Pengadaan Mebel	15.000.000,00	14.550.000,00	97,00
2)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	24.884.000,00	99,54
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	484.460.000,00	463.585.481,00	95,69
1)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.100.000,00	34.759.261,00	70,79
2)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
3)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	431.360.000,00	424.826.220,00	98,49
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.805.000,00	172.142.656,00	99,62
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.365.000,00	70.311.656,00	99,92
2)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.440.000,00	2.440.000,00	100,00
3)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	99.391.000,00	99,39
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	613.338.700,00	610.632.150,00	99,56
a	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	613.338.700,00	610.632.150,00	99,56
1)	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	513.338.700,00	511.404.150,00	99,62
2)	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	100.000.000,00	99.228.000,00	99,23

3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	34.511.007.000,00	5.902.994.620,00	17,10
a	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	34.511.007.000,00	5.902.994.620,00	17,10
1)	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	34.481.007.000,00	5.873.024.620,00	17,03
2)	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	30.000.000,00	29.970.000,00	99,90
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	796.000.000,00	793.467.900,00	99,68
a	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	796.000.000,00	793.467.900,00	99,68
1)	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi	40.000.000,00	39.829.900,00	99,57

	dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
2)	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	221.000.000,00	218.768.000,00	98,99
3)	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	535.000.000,00	534.870.000,00	99,98
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	372.266.900,00	363.550.080,00	97,66
a	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	372.266.900,00	363.550.080,00	97,66
1)	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	312.266.900,00	303.910.080,00	97,32
2)	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	60.000.000,00	59.640.000,00	99,40
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.072.132.000,00	2.060.512.460,00	99,44
a	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2.072.132.000,00	2.060.512.460,00	99,44

1)	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	125.000.000,00	124.209.500,00	99,37
2)	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.477.132.000,00	1.468.570.000,00	99,42
3)	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20.000.000,00	18.514.960,00	92,57
4)	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	450.000.000,00	449.218.000,00	99,83
JUMLAH BELANJA		41.978.296.600,00	13.204.658.447,00	31,46

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamonga Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamonga Tahun 2023. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamonga Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamonga dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Selama tahun 2023 Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamonga telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan pada organisasi serta telah dapat pula memenuhi sasaran - sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Indikator keberhasilan dapat dilihat dari prosentase Capaian Kinerja pada setiap sasaran. Dari segi anggaran hampir terealisasi sesuai dengan target yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2023.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bakesbangpol Kabupaten Lamongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Bakesbangpol Kabupaten Lamongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lamongan.

B. SARAN

Keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian kinerja sasaran merupakan proses pembelajaran dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang perlu dicermati guna peningkatan kinerja dimasa mendatang. Hal ini

dapat dilakukan dengan melaksanakan program secara optimal melalui pendekatan pemberdayaan dan optimalisasi sumber daya yang dimiliki dan tentunya perencanaan yang baik.

Lamongan, Januari 2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN**

Drs. DIANTO HARI WIBOWO, M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19760410 199412 1 002

LAMPIRAN

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2021-2026

TUJUAN		SASARAN		Baseline 2020	Target Kinerja					CARA MENCAPI TUJUAN DAN SASARAN		KONDISI AKHIR
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		2022	2023	2024	2025	2026	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berwawasan kebangsaan serta sadar politik	Nilai Toleransi	Meningkatnya harmoni sosial dan wawasan kebangsaan	Prosentase konflik ipoleksosbud, hukum dan HAM yang diselesaikan (Jml masalah yg selesai x 100 / Jml masalah yg masuk)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan penanganan konflik serta partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesatuan dan persatuan bangsa melalui sosialisasi wawasan kebangsaan	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	• 100% (14 konflik yang ada terselesaikan semua selama satu tahun pada tahun 2023)
			Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Peningkatan Pendidikan Politik	N/A	20%	40%	60%	80%	100%	Meningkatkan monitoring dan pemantauan pelaksanaan pemilu	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
			Prosentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Gubernur (Jml masyarakat pemilih x 100 / Jml hak pilih)	62,00%	-	-	62,00%	-	-	Penyaluran dana bantuan pada partai politik untuk mengembangkan peran dan kapasitas partai politik dalam pengembangan demokratisasi	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	• Tahun 2018 jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur sebesar 62%
			Prosentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan Presiden dan Pemilihan DPD/DPR/DPRD (Jml masyarakat pemilih x 100 / Jml hak pilih)	78,53%	-	-	78,53%	-	-	Peningkatan partisipasi politik masyarakat melalui		• Tahun 2019 jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden dan legislatif sebesar 78,53%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2023

			Prosentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Bupati ($\frac{\text{Jml masyarakat pemilih}}{\text{Jml hak pilih}} \times 100$)	77,24%	-	-	77,24%	-	-	sosialisasi pendidikan politik		• Tahun 2020 jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati sebesar 77,24%
		Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	87,11	87,14	87,15	87,16	87,17	87,13	Mengusulkan pendidikan dan pelatihan secara berkala		Nilai SAKIP pada tahun 2023 adalah
										Peningkatan kuantitas dan kompetensi Pegawai		
										Meningkatkan Sistem Pelayanan Administrasi Perkantoran		

**DOKUMEN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN
TRIBUNAN IV TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 pada Tribulan IV ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kepala Bakesbangpol Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Bakesbangpol Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016**, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 tahun 2021** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintah dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kepala Bakesbangpol Kabupaten Lamongan dengan Bupati Lamongan memuat 3 sasaran kinerja Utama dengan 3 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolak ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Bakesbangpol kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2023 sampai dengan Triwulan IV :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	
Meningkatnya Harmoni Sosial dan Wawasan Kebangsaan	1. Prosentase Konflik Ipoleksosbud, Hukum dan HAM yang ditangani	100%	100%
Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	1. Persentase Peningkatan Pendidikan Politik	55%	81,25%
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	89,10	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Memaksimalkan koordinasi anggota Tim Kewaspadaan Dini Daerah;
2. Membuat Posko Penanganan konflik sosial;
3. Membuat Prosedur yang lebih baik lagi terkait penerimaan bantuan LSM maupun parpol;
4. Melaksanakan koordinasi rutin dengan anggota parpol sehingga tindak lanjut temuan BPK dapat diselesaikan dengan cepat sehingga untuk proses pencairan bantuan tahun selanjutnya lebih tepat waktu;
5. Memaksimalkan pembinaan yang dilaksanakan dengan lebih memperluas sasaran yang dibina;
6. Memaksimalkan kinerja anggota sehingga indikator kinerja dapat tercapai dengan baik.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan kinerja guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Pejabat maupun Staf pada Bakesbangpol Kabupaten Lamongan di dorong terus agar lebih maksimal kinerjanya dengan cara mengadakan koordinasi rutin dan memwadahi segala bentuk konsep baru yang dapat meningkatkan kinerja.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
-
-

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2023 Tribulan IV:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Bakesbangpol Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, pencapaian dari target telah tercapai sesuai dengan yang diperjanjikan bahkan salah satunya melebihi dari apa yang direncanakan.

Lamongan, 30 Desember 2023

KEPALA BADAN KESATUN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN



Drs. DIANTO HARI WIBOWO, M.IP

Pembina Utama Muda

NIP. 19760410 199412 1 002



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Drs. DIANTO HARI WIBOWO, M.IP
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA.
Jabatan : Bupati Lamongan
selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lamongan, 4 September 2023

PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN



Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA.

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN



Drs. DIANTO HARI WIBOWO, M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19760410 199412 1 002

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya Harmoni Sosial dan Wawasan Kebangsaan	2. Prosentase Konflik Ipoleksosbud, Hukum dan HAM yang ditangani	100%
Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	2. Persentase Peningkatan Pendidikan Politik	55%
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	2. Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	89,10

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.785.933.000,-	APBD
2 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp. 641.000.000,-	APBD
3 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 2.412.673.000,-	APBD
4 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 626.000.000,-	APBD
5 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp. 380.000.000,-	APBD
6 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1.930.000.000,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN	Rp. 9.775.606.000,-	APBD

Lamongan, 4 September 2023

PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN



M. HONUR EFENDI, MBA.

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN



Drs. DIANTO HARI WIBOWO, M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19760410 199412 1 002

PENGHARGAAN

Pada tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan memperoleh beberapa prestasi dan penghargaan yaitu sebagai berikut:

1. Pada tanggal 14 Februari 2023 : Menerima Penghargaan Penerapan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2022 dengan Predikat Memuaskan.



Gambar 1. Penerimaan Penghargaan Penerapan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2022

2. Pada tanggal 15 September Tahun 2023 : Menerima Penghargaan Peringkat II Capaian Kinerja Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten se-Jawa Timur Tahun 2022, di Kota Surabaya.



Gambar 2. Penghargaan Peringkat II Capaian Kinerja Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten se-Jawa Timur Tahun 2022, di Kota Surabaya